



SALINAN

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMADUAN UNSUR-UNSUR PENANGGULANGAN BENCANA KE DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Pasal ini menegaskan keterkaitan erat antara penanggulangan bencana dengan pembangunan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah Daerah perlu memadukan unsur-unsur penanggulangan bencana (PB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi meningkatkan resiliensi dalam menghadapi bencana dan melindungi aset-aset serta hasil pembangunan dari dampak bencana yang merusak, serta demi mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penanggulangan bencana di daerah wajib berkolaborasi dengan Bappeda untuk mendorong penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengandung perspektif pengurangan risiko bencana yang kuat.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pemaduan unsur-unsur Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dibutuhkan pedoman yang dapat digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itulah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemaduan Unsur-Unsur Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para pihak terkait dalam melaksanakan pemaduan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Tujuan
Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar pelaksanaan pemaduan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terselenggara dengan cepat, tepat, dan akurat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan yang resilien dan berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup:

1. konsep dan prinsip pemaduan;
2. pelaksanaan pemaduan; dan
3. penyusunan telaah atau ringkasan pemaduan.

E. Pengertian

1. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana dan mengantisipasi isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran atas strategi.
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*).
3. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
4. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran dari penggunaan sumber daya.
5. Pemaduan adalah upaya memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II KONSEP DAN PRINSIP PEMADUAN

A. Konsep dan Prinsip

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemaduan merupakan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi unsur-unsur PB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemaduan unsur-unsur PB ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan kegiatan Pemerintah daerah dalam memasukkan atau menyatukan permasalahan dan upaya penanggulangan bencana ke dalam dokumen RPJMD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, unsur PB diintegrasikan ke dalam struktur (bab-bab) pada dokumen RPJMD sampai ke dalam program, sehingga dokumen RPJMD secara sistematis memuat ringkasan analisis permasalahan terkait risiko dan potensi dampak bencana pada sektor. Analisis tersebut menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program serta indikator kinerja dengan target-target pengurangan risiko bencana di daerah.

Pemaduan unsur-unsur PB ke dalam RPJMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proses pemaduan mengikuti logika dan alur penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Proses dan penyusunan substansi pemaduan dilaksanakan secara teknokratis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas serta partisipatif, dan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
- c. Substansi pemaduan harus tersedia terlebih dahulu sebagai bahan dalam proses pemaduan;
- d. Unsur PB diintegrasikan ke dalam semua sektor pembangunan terkait;
- e. Proses pemaduan unsur PB dapat menjadi masukan bagi penetapan prioritas dan strategi dalam RPJMD;
- f. Proses pemaduan unsur PB dapat membantu meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.

B. Unsur-unsur Penanggulangan Bencana untuk Pemaduan

1. Posisi Rencana Penanggulangan Bencana dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam sistem perencanaan pembangunan daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada bagian (C) Hubungan antar Dokumen dari Bab I Pendahuluan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran konteks yang jelas tentang pentingnya RPB sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

2. Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan

Kondisi kebencanaan daerah yang berisi tentang: Informasi Sejarah dan Dampak Bencana; Risiko Bencana; Analisis Potensi Kebencanaan Daerah dari kondisi geografis, geologis, topografis, klimatologis, hidrologis, dan demografis; Telaah Tata Ruang dan Penggunaan Lahan yang Berisiko Bencana; Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya dan Penyajian capaian SPM Sub urusan Bencana di Daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada Bab II terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah.

3. Permasalahan dan Isu Strategis PB

Permasalahan pokok dan isu strategis PB daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada bagian (A) Permasalahan Pembangunan dan (B) Isu Strategis dari Bab IV terkait Permasalahan dan Isu Strategis.

4. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja PB Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja PB Daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada bagian (E) Tujuan dan Sasaran dari Bab V terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

5. Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas PB Daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada bagian (A) Strategi, (B) Arah Kebijakan Pembangunan, dan (C) Prioritas Program Pembangunan dari Bab VI terkait Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk PB

Indikator Kinerja Utama PB Daerah perlu dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD pada bagian (A) Indikator Kinerja Utama Daerah dari Bab VIII terkait Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Unsur PB yang dipadukan ke dalam RPJMD

No	Struktur RPJMD (Permendagri No.86/2017)	Unsur-unsur PB	Materi Pemaduan
1	BAB I Pendahuluan (C) Hubungan Antar Dokumen	Posisi RPB dalam tata kelola perencanaan	1. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2	BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (A) Aspek Geografi dan Demografi (B) Aspek Kesejahteraan Masyarakat (C) Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (E) Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya	Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan	1. Informasi Sejarah dan Dampak Bencana 2. Potensi Risiko Bencana 3. Analisis Potensi Kebencanaan Daerah 4. Telaah Tata Ruang dan Penggunaan Lahan yang Berisiko Bencana 5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya 6. Penyajian capaian SPM Sub Urusan Bencana
3	BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis (A) Permasalahan Pembangunan (B) Isu Strategis	Permasalahan dan Isu Strategis PB	1. Permasalahan Pokok PB Daerah 2. Isu Strategis Penanggulangan Bencana
4	Bab V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran (E) Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja PB Daerah	2. Tujuan PB Daerah 3. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah 4. Target Kinerja PB Daerah

No	Struktur RPJMD (Permendagri No.86/2017)	Unsur-unsur PB	Materi Pemaduan
5	Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (A) Strategi (B) Arah Kebijakan Pembangunan (C) Prioritas Program Pembangunan	Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB	1. Strategi PBDaerah 2. Arah Kebijakan PB Daerah, dan 3. Program Prioritas PB Daerah.
6	Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (A) Indikator Kinerja Utama/Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Utama Daerah untuk PB

BAB III PELAKSANAAN PEMADUAN

Tahapan Pemaduan Unsur-Unsur PB ke dalam RPJMD

Pemaduan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan melalui tahap-tahap berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari:

a. Pembentukan Tim Pemaduan

Pemaduan unsur-unsur PB ke dalam RPJMD merupakan proses yang membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemangku kepentingan daerah. Untuk itu, dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh BPBD dan sekurang-kurangnya melibatkan unsur Bappeda, OPD pengelola data statistik daerah dan Forum PRB. Tim ini bertugas untuk menyusun telaah atau ringkasan materi PB dan melakukan advokasi kepada pimpinan daerah termasuk tim penyusunan RPJMD untuk memastikan agar unsur-unsur PB dipadukan ke dalam dokumen RPJMD. Tim sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD.

b. Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pendukung

Pengumpulan dan analisis data-informasi pendukung dilakukan oleh Tim. Data dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- 1) Informasi kawasan rawan bencana, karakteristik ancaman bencana dan risiko bencana.
- 2) Sejarah kejadian dan dampak Bencana.
- 3) Permasalahan dan isu-isu strategis kebencanaan.
- 4) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana.
- 5) Capaian Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Data dan informasi di atas dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen seperti: Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Evaluasi RPJMD periode sebelumnya dan hasil-hasil penelitian terkait yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

2. Tahap Penyiapan Materi Pemaduan

- a. Penyiapan dan penyusunan materi pemaduan dilakukan oleh Tim Pemaduan.
- b. Waktu penyiapan materi pemaduan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum proses penyusunan RPJMD dimulai.
- c. Materi pemaduan disajikan dalam bentuk telaah atau ringkasan materi pemaduan.
- d. Tim Pemaduan menggunakan langkah-langkah penyusunan materi pemaduan pada Bab IV Petunjuk Pelaksanaan ini

3. Tahap Pelaksanaan Pemaduan PB ke dalam RPJMD

Pelaksanaan pemaduan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan BPBD. Proses pemaduan dilaksanakan melalui dua tahap sebagai berikut:

a. Penyampaian hasil telaah atau ringkasan materi pemaduan

Hasil telaah atau ringkasan materi pemaduan disampaikan kepada pimpinan daerah dan atau sekretaris daerah dengan tembusan Bappeda melalui nota dinas/telaah staf dari Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD untuk disampaikan dalam rangka memberikan gambaran kepada Bappeda dan tim penyusun RPJMD.

format hasil telaah/ringkasan materi pemaduan Unsur-unsur Penanggulangan Bencana tercantum pada Poin A Lampiran 1 Petunjuk Pelaksanaan

- b. Pengawasan pelaksanaan pemaduan PB ke dalam penyusunan RPJMD
Pengawasan hasil telaah atau ringkasan materi pemaduan dilaksanakan untuk memastikan agar unsur penanggulangan bencana terakomodasi pada bab-bab terkait di dalam dokumen RPJMD, sejak tahap rancangan teknokratis, rancangan awal, rancangan sampai pada rancangan akhir. Pengawasan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:
 - 1) Pendekatan teknokratis melalui wakil-wakil BPBD dan Bappeda yang berada dalam tim penyusun untuk ikut serta dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen RPJMD dan;
 - 2) Pendekatan partisipatif dapat dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah saat rancangan awal RPJMD, Musrenbang saat penyusunan rancangan RPJMD dan forum-forum tematik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJMD.

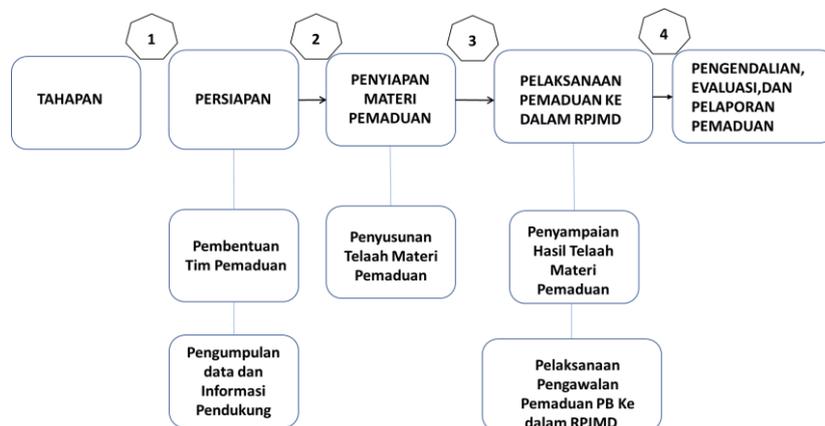
4. Tahap Pengendalian dan Pelaporan Pemaduan

Pengendalian dan pelaporan pemaduan dilakukan untuk memastikan agar unsur-unsur penanggulangan bencana benar-benar dipadukan ke dalam dokumen RPJMD. Pengendalian dan pelaporan dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan RPJMD dan setelah RPJMD ditetapkan. Proses ini dikoordinasikan oleh BPBD bersama Bappeda dengan cara:

- a. Bappeda selaku tim penyusun RPJMD melakukan proses Pengendalian dan Pelaporan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. BPBD melakukan proses Pengendalian dan Pelaporan berkoordinasi dengan Bappeda selaku tim penyusun RPJMD dengan menggunakan Form pada Poin B Lampiran Petunjuk Pelaksanaan.
- c. Pelaporan Pemaduan dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.
- d. BPBD Provinsi menyampaikan laporan pemaduan PB ke dalam RPJMD kepada BNPB melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi dengan tembusan Kemendagri pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- e. BPBD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pemaduan PB ke dalam RPJMD kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Format pengendalian dan pemantauan pemaduan tercantum dalam Poin B Lampiran 1 Petunjuk Pelaksanaan.

Secara keseluruhan tahapan pemaduan Unsur-Unsur Penanggulangan Bencana ke dalam RPJMD tersusun dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pemaduan Unsur-Unsur PB ke dalam RPJMD

BAB IV

PENYUSUNAN TELAAH ATAU RINGKASAN MATERI PEMADUAN

Dalam rangka memberikan gambaran bagi pimpinan daerah dan instansi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan telaah/ringkasan materi pemaduan.

A. Penyusunan Telaah/Ringkasan Materi Pemaduan

Kerangka penyusunan telaah/ringkasan materi unsur-unsur penanggulangan bencana yang akan dipadukan ke dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Posisi Rencana PB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini Tim Pemaduan menyajikan gambar struktur posisi RPB dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan hubungannya dengan perencanaan lainnya mulai dari RIPB, Renas PB, dan RPJMN sampai RPJMD dan RTRW Daerah. Gambar selanjutnya dilengkapi dengan narasi singkat tentang hubungan RPB dengan berbagai instrumen perencanaan dan pentingnya memadukan RPB ke dalam RPJMD. Perlu ditekankan juga kedudukan RPB sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Gambar dan narasi kemudian dipadukan ke dalam rancangan RPJMD pada bagian (C) Hubungan antar Dokumen dari Bab I Pendahuluan.

2. Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan

a. Karakteristik kebencanaan daerah

Pada bagian ini Tim Pemaduan pertama-tama menyusun uraian tentang karakteristik kebencanaan daerah dilihat dari kondisi geografis, geologis, topografis, klimatologis, hidrologis, dan demografis sebagai berikut:

- Aspek geografis berisi uraian tentang kondisi lingkungan alam dari Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, misalnya apakah secara geografis terdapat gunung api aktif yang berpotensi mengalami erupsi dan menyebabkan kebakaran hutan/lahan serta banjir lahar hujan.
- Aspek geologis berisi uraian tentang struktur tanah dan bebatuan di bawah permukaan bumi di Provinsi/Kabupaten/kota bersangkutan, misalnya apakah terdapat sesar aktif yang berpotensi memicu aktivitas kegempaan dan/atau aktivitas vulkanik.
- Aspek topografis berisi uraian tentang letak atau lokasi suatu Provinsi/Kabupaten/Kota dan bentuk muka buminya, misalnya daerah yang terdiri dari pegunungan dengan lereng-lereng curam berpotensi mengalami longsor ketika ditimpa hujan dengan intensitas ekstrem.
- Aspek hidrologis berisi uraian tentang hal-hal yang terkait dengan tata air di Provinsi/Kabupaten/Kota terutama berkaitan dengan kondisi Daerah Aliran Sungai di daerah tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan potensi banjir dan kekeringan.
- Aspek klimatologis berisi uraian tentang kondisi iklim di Provinsi/Kabupaten/Kota yang menentukan pola musim, misalnya musim hujan dan musim kemarau, yang dapat berpengaruh pada sektor pertanian, perikanan dan bidang-bidang lainnya.
- Aspek demografis berisi uraian tentang profil dan perkiraan jumlah penduduk di Provinsi/Kota. Sebaran penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dapat menggambarkan potensi keterpaparan dan kerentanan warga terhadap ancaman bencana tertentu.

Data dan informasi Aspek-aspek kondisi daerah tersebut dapat diperoleh dari:

- bagi Daerah yang telah Memiliki KRB dan RPB yang masih berlaku diambil dari Bab III dokumen KRB dan Bab II dokumen RPB yang terdiri dari aspek: (a) Geografi (b) Geologi (c) Topografi (d) Hidrologi (e) Klimatologi (f) Demografi.
- bagi daerah yang habis masa berlaku KRB/RPB-nya diambil dari Bab III KRB dan Bab II RPB periode sebelumnya.
- bagi daerah yang belum memiliki KRB/RPB dan habis masa berlaku KRB/RPB-nya diambil dari Bab II dokumen KLHS terkait gambaran umum wilayah, Bab II dokumen RPJMD gambaran umum kondisi wilayah.

b. Informasi sejarah kejadian dan dampak bencana

Tim Pemaduan menyusun uraian tentang informasi sejarah kejadian dan dampak bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Sejarah kejadian dan dampak bencana: uraian tentang kejadian bencana historis berupa jumlah serta besaran dampak yang ditimbulkan yang dapat dijadikan sebagai alat bantu pemahaman terhadap kecenderungan kejadian bencana, bahaya, kerentanan, kapasitas, paparan, dan kerusakan lingkungan.
Format Penyajian Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana tercantum dalam Poin A Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.
- Penduduk yang terpapar ancaman bencana: uraian tentang data dan informasi total jumlah penduduk terpapar berbagai ancaman yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Format Penyajian Jumlah Penduduk Terpapar Ancaman Bencana tercantum dalam Poin B Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.
- Potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana: uraian tentang data dan informasi potensi kerusakan dan kerugian dalam hal fisik, ekonomi dan lingkungan, berdasarkan berbagai jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Format Penyajian Data Potensi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat bencana tercantum dalam Poin C Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.
- Luas wilayah berpotensi terdampak bencana: uraian tentang data dan informasi total luas wilayah (hektar) di Provinsi/Kabupaten/Kota yang berpotensi terdampak berbagai jenis bencana.
Format Penyajian Potensi luas wilayah terdampak bencana tercantum dalam Poin D Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.
- Informasi tingkat risiko bencana di daerah: uraian tentang probabilitas dan kecenderungan atau besaran dampak dari setiap bencana yang dapat terjadi di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Format Penyajian Tata tingkat risiko bencana tercantum dalam Poin E Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

Data dan informasi risiko bencana serta sejarah kebencanaan di daerah yang bersumber dari:

- bagi daerah yang memiliki KRB dan RPB yang masih berlaku diambil dari Bab III Dokumen KRB dan Bab II RPB di antaranya: (a) Sejarah kejadian dan dampak bencana; (b) Deskripsi penduduk terpapar

ancaman bencana (c) Deskripsi potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana; (d) Deskripsi potensi luas wilayah terdampak bencana; (e) Informasi tingkat risiko bencana.

- bagi daerah yang belum memiliki atau habis masa berlakunya KRB/RPB diambil dari Bab VII dokumen RTRW Daerah terkait kawasan rawan bencana, Bab II Renstra BPBD terkait pelayanan perangkat daerah, Bab II RPJMD periode sebelumnya terkait gambaran umum wilayah dan dapat mengambil dari DIBI BNPB (<http://dibi.bnpb.go.id>). Informasi risiko bencana pada website <https://inarisk.bnpb.go.id/webgis>. Ketentuan Pengambilan Data dan Informasi terkait dengan daerah yang belum memiliki atau habis masa berlakunya KRB/RPB dilaksanakan sesuai Lampiran IV Petunjuk Pelaksanaan.
- Informasi sejarah kebencanaan dapat diambil dari DIBI BNPB (<http://dibi.bnpb.go.id>) atau pencatatan data di Pemerintah Daerah.

c. Identifikasi risiko bencana terkait aspek tata ruang

Tim Pemaduan juga mendeskripsikan risiko bencana terkait aspek tata ruang yang diidentifikasi dari dokumen Bab VII dokumen RTRW Daerah terkait kawasan rawan bencana. Ini dilaksanakan dengan menganalisis karakteristik ancaman berdasarkan tren pemanfaatan lahan dan tata ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana

d. Evaluasi kinerja pembangunan daerah

Tim Pemaduan menyusun ringkasan evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan bencana melalui capaian Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Ringkasan ini menyajikan data dasar (baseline) dan time series penurunan nilai IRBI dan peningkatan nilai IKD periode 5 tahun terakhir.

Format Penyajian Data Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah tercantum dalam Poin F Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

e. Penyajian capaian SPM Sub urusan Bencana di Daerah

Tim Pemaduan menyusun ringkasan penyajian capaian SPM daerah berdasarkan jenis dan mutu layanan urusan bencana yang berhak diterima oleh masyarakat, yaitu; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Format Penyajian Data capaian SPM Daerah tercantum dalam Poin G Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

3. Permasalahan dan Isu Strategis PB

Permasalahan dan isu strategis kebencanaan daerah mencakup masalah pokok PB dan isu strategis PB daerah sebagai berikut:

a. Masalah pokok PB

Tim Pemaduan merumuskan daftar dan deskripsi masalah pokok atau masalah utama dalam penanggulangan bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota. Masalah pokok juga dapat berarti faktor pemicu yang mengharuskan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan risiko untuk ancaman-ancaman bencana

prioritas untuk melindungi warga dan hasil-hasil pembangunan. Informasi rumusan akar masalah/masalah pokok penanggulangan bencana dapat diambil dari Bab II Dokumen RPB bagi daerah yang telah memiliki dan aktif. Bagi daerah yang belum memiliki atau habis masa berlakunya KRB/RPB dapat mengidentifikasi akar masalah/masalah pokok penanggulangan bencana daerah berdasarkan berdasarkan keterpaparan risiko bencana, nilai terendah Indeks Ketahanan Daerah dan kesenjangan pencapaian pembangunan daerah terkait penanggulangan bencana bagi daerah yang belum memiliki atau habis masa berlaku KRB/RPB-nya.

Format Penyajian Daftar Identifikasi Masalah Pokok PB tercantum dalam Poin H Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

b. Isu strategis PB

Tim Pemaduan menyusun daftar dan deskripsi isu strategis PB daerah. Isu strategis PB daerah adalah pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan melalui program-program pengurangan risiko bencana dalam lima tahun ke depan. Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Informasi isu strategis kebencanaan Daerah dapat diambil dari Bab II Dokumen RPB bagi daerah yang telah memiliki dan aktif.

4. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja PB Daerah

Tim Pemaduan menguraikan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dalam hal penanggulangan bencana yang diambil dari dokumen RPB. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis), sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Rumusan dan indikator tujuan PB dapat menjadi masukan bagi rumusan tujuan/sasaran dan indikator RPJMD dan dapat diadopsi sebagai IKU Kepala Daerah. Sementara itu, rumusan dan indikator sasaran PB dapat menjadi masukan rumusan sasaran RPJMD atau rumusan program dan indikator pembangunan daerah yang diadopsi sebagai Program Pemda (IKU Sekda/Asisten Sekda). Daftar dan Informasi Tujuan dan Sasaran PB dapat diperoleh pada Bab IV dokumen RPB bagi daerah yang memiliki RPB yang masih berlaku.

Format Penyajian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja PB Daerah tercantum dalam Poin I Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

5. Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB

Tim pemaduan merumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas PB sebagai berikut:

a. Strategi penanggulangan bencana daerah

Tim Pemaduan merumuskan strategi atau langkah-langkah strategis yang berisikan upaya untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana dalam lima tahun ke depan. Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran PB yang akan dicapai selama 5 tahun atau satu strategi

dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus.

b. Arah kebijakan PB

Tim Pemaduan menyarikan arah penanggulangan bencana daerah yang diambil dari dokumen RPB. Rumusan arah penanggulangan bencana daerah sangat penting agar dapat diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Daerah yang belum memiliki dokumen RPB dapat menyusun arah kebijakan penanggulangan bencana daerah dengan memperhatikan arah kebijakan penanggulangan bencana pusat dan Provinsi bagi Kabupaten/Kota.

Format Penyajian Strategi dan Arah Kebijakan PB di Daerah tercantum dalam Poin J Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

c. Prioritas program kebencanaan daerah

Tim Pemaduan merumuskan program terkait penanggulangan bencana/kebencanaan prioritas daerah yang adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk satu atau lebih kegiatan. Program terkait PB prioritas dipilih berdasarkan nilai strategisnya dalam menyelesaikan isu-isu strategis PB yang telah dirumuskan. Pertimbangan untuk menentukan program antara lain adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lainnya terkait kebencanaan, program yang paling efektif dalam meningkatkan pengurangan risiko dan sekaligus menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim, program yang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan melakukan pemulihan pascabencana dengan membangun kembali dengan lebih baik. Program Prioritas Kebencanaan tidak hanya Program Penanggulangan Bencana di BPBD, namun bisa Program di SKPD lain terkait kebencanaan. Rumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas PB dapat diperoleh dari Bab IV dokumen RPB bagi daerah yang memiliki RPB yang masih berlaku.

Format Prioritas program kebencanaan daerah yang disajikan dalam bentuk Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program tercantum dalam Poin K Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

6. Kinerja Penyelenggaraan PB Pemerintah Daerah

Indikator kinerja utama PB di daerah perlu dirumuskan untuk dipadukan ke dalam rancangan dokumen RPJMD. Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja PB daerah yang mencerminkan kemajuan dan peningkatan kinerja pengurangan risiko bencana dan atau penanggulangan bencana di daerah dari tahun ke tahun baik berupa peningkatan indeks kapasitas daerah (IKD) maupun penurunan indeks risiko bencananya (IRBI) perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Format Penyajian Proyeksi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah untuk PB tercantum dalam Poin L Lampiran II Petunjuk Pelaksanaan.

B. Contoh Telaah/Ringkasan Materi Pemaduan

Terkait dengan contoh telaah/penyiapan materi pemaduan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tercantum dalam Lampiran III Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun sebagai panduan bagi BNPB, BPBD, Bappeda, Pemerintah Daerah dan Para Pihak terkait dalam memadukan unsur-unsur Penanggulangan Bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mewujudkan resiliensi berkelanjutan di Indonesia.

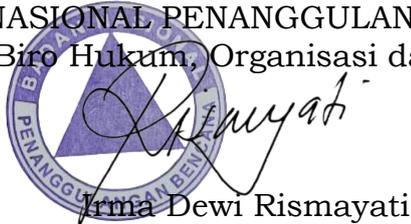
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN I

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMADUAN
UNSUR-UNSUR PENANGGULANGAN
BENCANA KE DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024

A. Format Hasil Telaah/Ringkasan Materi Pemaduan Unsur-unsur Penanggulangan Bencana

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang pentingnya penyusunan dokumen Telaah/Ringkasan Materi Pemaduan PB ke dalam RPJMD dan dasar-dasar pertimbangannya dalam konteks tata kelola pemerintahan di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dokumen.

BAB II. RINGKASAN MATERI PEMADUAN

2.1 Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

(dipadukan ke dalam Bab I. Pendahuluan dari rancangan RPJMD pada bagian Hubungan antar Dokumen)

2.1.1 Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan gambar struktur posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan sedikit narasi yang menjelaskan gambar tersebut.

2.1.2 Hubungan RPB dengan Rencana Lainnya

Bagian ini menjelaskan tentang hubungan antara RPB dengan perencanaan lainnya mulai dari tingkat pusat seperti RIPB, Renas PB, dan RPJMN sampai tingkat daerah dalam hal ini RTRW daerah dan RPJMD.

2.2 Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan

(dipadukan ke dalam Bab II. Gambaran Umum Kondisi Wilayah dari rancangan RPJMD pada aspek Geografi dan Demografi)

2.2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Bagian ini menyajikan ringkasan karakteristik ancaman bencana pada aspek-aspek kondisi daerah.

2.2.2 Informasi Sejarah Kebencanaan dan Potensi Risiko Bencana Daerah

Bagian ini menyajikan data dan informasi risiko bencana serta sejarah kebencanaan di daerah.

2.2.3 Identifikasi Risiko Bencana terkait Aspek Tata Ruang

(dipadukan ke dalam Bab II. Gambaran Umum Kondisi Wilayah dari

rancangan RPJMD pada bagian Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

2.2.4 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dalam Bidang PB

(dipadukan ke dalam Bab II. Gambaran Umum Kondisi Wilayah dari rancangan RPJMD pada bagian Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya)

2.2.5 Penyajian Capaian SPM Daerah

(dipadukan ke dalam Bab II terkait Gambaran Umum Kondisi Daerah.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis PB

(dipadukan ke dalam Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis dari rancangan RPJMD pada bagian Permasalahan Pembangunan)

2.3.1 Permasalahan Pokok PB

Bagian ini menyajikan rumusan dan deskripsi akar masalah atau masalah pokok penanggulangan bencana daerah.

2.3.2 Pengelompokan Masalah Pokok PB

Bagian ini menyajikan daftar masalah pokok penanggulangan bencana daerah.

2.3.3 Rumusan Isu Strategis PB

Bagian ini menyajikan daftar isu strategis PB daerah

2.4 Tujuan dan Sasaran PB

(dipadukan ke dalam Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari rancangan RPJMD pada bagian Tujuan dan Sasaran)

2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB Daerah

(dipadukan ke dalam Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dari rancangan RPJMD)

2.5.1 Strategi PB

Bagian ini menyajikan daftar strategi PB daerah.

2.5.2 Arah Kebijakan PB

Bagian ini menyajikan informasi arah kebijakan PB daerah.

2.5.3 Prioritas Program terkait Kebencanaan

Bagian ini menyajikan daftar prioritas program kebencanaan daerah.

2.6 Indikator Kinerja Daerah untuk PB

(dipadukan ke dalam Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari rancangan RPJMD pada bagian Indikator Kinerja Utama Daerah)

Bagian ini menyajikan data dan Informasi kinerja PB (IRBI/IKD) dan proyeksi untuk 5 tahun ke depan.

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

B. Format Pengendalian dan Pelaporan

Pengendalian dan Pelaporan Pemaduan PB ke dalam RPJMD					
No	Unsur Pemaduan	Hasil Pengendalian dan Pelaporan			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tidak Lanjut Penyempurnaan Apabila tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gambar struktur posisi RPB di dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	Informasi sejarah dan dampak bencana serta risiko bencana				
3	Analisis karakteristik ancaman bencana dari berbagai aspek				
4	Identifikasi risiko bencana terkait aspek tata ruang				
5	Data Capaian IKD dan IRBI 5 tahun sebelumnya				
6	Data Capaian SPM sub urusan bencana sebelumnya				
7	Isu strategis, tujuan, sasaran dan arah kebijakan PB				
8	Prioritas program PB				
9	Proyeksi peningkatan IKD dan/atau penurunan IRBI sebagai Indikator Kinerja Pemda				

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi unsur pemaduan PB

Kolom (3) diisi tanda (v-ya) kesesuaian pemaduan PB ke dalam RPJMD

Kolom (4) diisi tanda (v-tidak) ketidaksesuaian pemaduan PB ke dalam RPJMD

Kolom (5) diisi faktor penyebab ketidaksesuaian pemaduan PB

Kolom (6) diisi rencana tindak lanjut dan rekomendasi

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN II

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMADUAN
UNSUR-UNSUR PENANGGULANGAN
BENCANA KE DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024**

A. Format Penyajian Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana

Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana									
No	Kejadian	Jumlah Penduduk	Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi jenis ancaman bencana yang pernah terjadi

Kolom (3) diisi jumlah total penduduk terpapar berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (4) diisi jumlah total korban meninggal kejadian bencana

Kolom (5) diisi jumlah total korban luka-luka kejadian bencana

Kolom (6) diisi jumlah total korban hilang kejadian bencana

Kolom (7) diisi jumlah total korban mengungsi kejadian bencana

Kolom (8) diisi jumlah total rumah rusak berat kejadian bencana

Kolom (9) diisi jumlah total rumah rusak ringan kejadian bencana

Kolom (10) diisi jumlah total luas lahan terdampak kejadian bencana

B. Format Penyajian Jumlah Penduduk Terpapar Ancaman Bencana

Jumlah Penduduk Terpapar Ancaman Bencana						
No	Jenis Bahaya	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Jumlah Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi jenis ancaman bencana yang pernah terjadi

Kolom (3) diisi jumlah total penduduk terpapar berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (4) diisi jumlah total penduduk kelompok umur rentan (lansia) terpapar berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (5) diisi jumlah total penduduk miskin berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (6) diisi jumlah total penduduk disabilitas terpapar berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (7) diisi kelas kerentanan setiap jenis ancaman bencana (kelas rendah, sedang, tinggi)

C. Format Penyajian Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana

Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana							
No	Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas	Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian		Kerusakan Lingkungan	Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi jenis ancaman bencana yang pernah terjadi

Kolom (3) diisi jumlah total kerugian fisik berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (4) diisi jumlah total kerugian ekonomi berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (5) diisi jumlah total kerugian fisik dan ekonomi berdasarkan jenis ancaman bencana

Kolom (6) diisi kelas kerugian (rendah, sedang, tinggi) setiap jenis ancaman bencana

Kolom (7) diisi total potensi luas kerusakan lahan dan lingkungan setiap jenis ancaman bencana

Kolom (8) diisi kelas kerusakan (rendah, sedang, tinggi) dari setiap jenis bencana

D. Format Penyajian Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana

Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana						
No	Jenis Bahaya	Risiko			Total Luas (Ha)	Kelas
		Luas Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	JUMLAH					

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi jenis ancaman bencana yang pernah terjadi

Kolom (3) diisi jumlah total lahan terdampak kategori rendah dari jenis bencana

Kolom (4) diisi jumlah total lahan terdampak kategori sedang dari jenis bencana

Kolom (5) diisi jumlah total lahan terdampak kategori tinggi dari jenis bencana

Kolom (6) diisi jumlah total lahan terdampak kategori rendah, sedang dan tinggi dari jenis bencana

Kolom (7) diisi tingkat risiko (kerentanan) dari setiap jenis bencana

E. Format Penyajian Tata Tingkat Risiko Bencana

<i>Tata Tingkat Risiko Bencana</i>					
No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi jenis ancaman bencana yang pernah terjadi

Kolom (3) diisi kelas bahaya, rendah, sedang tinggi berdasarkan jenis ancaman

Kolom (4) diisi kelas kerentanan, (rendah, sedang tinggi) berdasarkan setiap jenis ancaman bencana

Kolom (5) diisi kelas (kapasitas, rendah, sedang tinggi) berdasarkan setiap jenis ancaman bencana

Kolom (6) diisi dengan kelas risiko, (rendah, sedang tinggi) berdasarkan setiap jenis ancaman bencana

F. Format penyajian Tata Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

<i>Tata Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah</i>								
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja PB	Capain Tahunan					Kelas
			(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)
1		IRBI						
		IKD						

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi nama Provinsi, Kota/Kabupaten

Kolom (3) diisi indikator PB daerah

Kolom (4) diisi nilai IRBI dan IKD Tahun yang bersangkutan

Kolom (5) diisi kelas kategori nilai IRBI dan IKD

G. Format penyajian Data capaian SPM Daerah

Data Penyajian capaian SPM Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KABUPATEN/KOTA XX							
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
			1.				
			2.				
			dst				
	JUMLAH INDIKATOR						
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan					
			1.				
			2.				
			dst				
	JUMLAH INDIKATOR						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
			1.				
			2.				
			dst				
	JUMLAH INDIKATOR						
	JUMLAH PROGRAM						

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi no urut layanan urusan wajib dasar

Kolom (2) diisi program PB

Kolom (3) diisi nama kegiatan berdasarkan jenis dan mutu layanan urusan bencana

Kolom (4) diisi sub kegiatan berdasarkan jenis dan mutu layanan urusan bencana

Kolom (5) diisi satuan sub kegiatan

Kolom (6) diisi jumlah anggaran perencanaan

Kolom (7) diisi jumlah realisasi anggaran perencanaan

Kolom (8) diisi prosentase capaian

H. Format penyajian Daftar Identifikasi Masalah Pokok PB

Daftar Identifikasi Masalah Pokok PB

Keterpaparan Dari Sumber Bahaya (KRB)	Kajian Kapasitas Daerah (IKD)	Masalah Pokok Pembangunan
(1)	(2)	(3)
1.	1.	1.
2.	2.	2.
Dst	Dst	Dst

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi faktor/kondisi yang mengakibatkan tingginya keterpaparan daerah terhadap potensi risiko bencana prioritas daerah
 Kolom (2) diisi kesenjangan pencapaian Indeks Ketangguhan Daerah, terutama pada prioritas dengan bobot nilai indikator yang relatif tinggi (prioritas 5 dan 6) dengan capaian yang masih rendah

Kolom (3) diisi kesenjangan terhadap pencapaian pencapaian RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana.

I. Format Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja PB Daerah

Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran				
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.	1.	1.	1.
			2.	2.
			3.	3.

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi isu strategis PB daerah

Kolom (2) diisi tujuan PB daerah

Kolom (3) diisi indikator tujuan PB daerah

Kolom (4) diisi sasaran PB daerah

Kolom (5) diisi indikator sasaran PB daerah

J. Format Strategi dan Arah Kebijakan PB

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1.	1.	1.
	2.	2.

Cara Pengisian :

Kolom (1) diisi sasaran PB daerah

Kolom (2) diisi strategi PB daerah

Kolom (3) diisi arah kebijakan PB daerah

K. Format Prioritas Program Kebencanaan Daerah

Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program			
Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.	1.	1.
		2.	2.

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi sasaran PB daerah

Kolom (2) diisi indikator sasaran PB daerah

Kolom (3) diisi program/sub kegiatan PB daerah

Kolom (4) diisi indikator sasaran program/sub kegiatan PB

L. Format Proyeksi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah untuk PB

Proyeksi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah untuk PB									
No	Indikator Kinerja PB	Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2023	Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB					Kondisi Akhir Periode (2029)	Sumber Data
			Tahun ke-1 (2024)	Tahun ke-2 (2025)	Tahun ke-3 (2026)	Tahun ke-4 (2027)	Tahun ke-5 (2028)		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)
1	IRBI								BNPB
2	IKD								BPBD

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi indikator PB daerah

Kolom (3) diisi data dasar/acuan nilai IRBI dan IKD

Kolom (4) diisi nilai proyeksi IRBI dan IKD Tahun yang bersangkutan

Kolom (5) diisi nilai akhir IRBI dan IKD yang akan dicapai

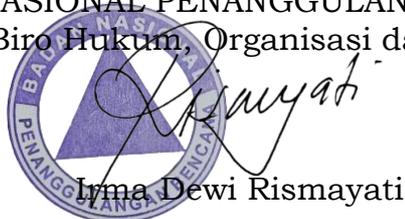
Kolom (6) diisi sumber data IRBI dan IKD

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



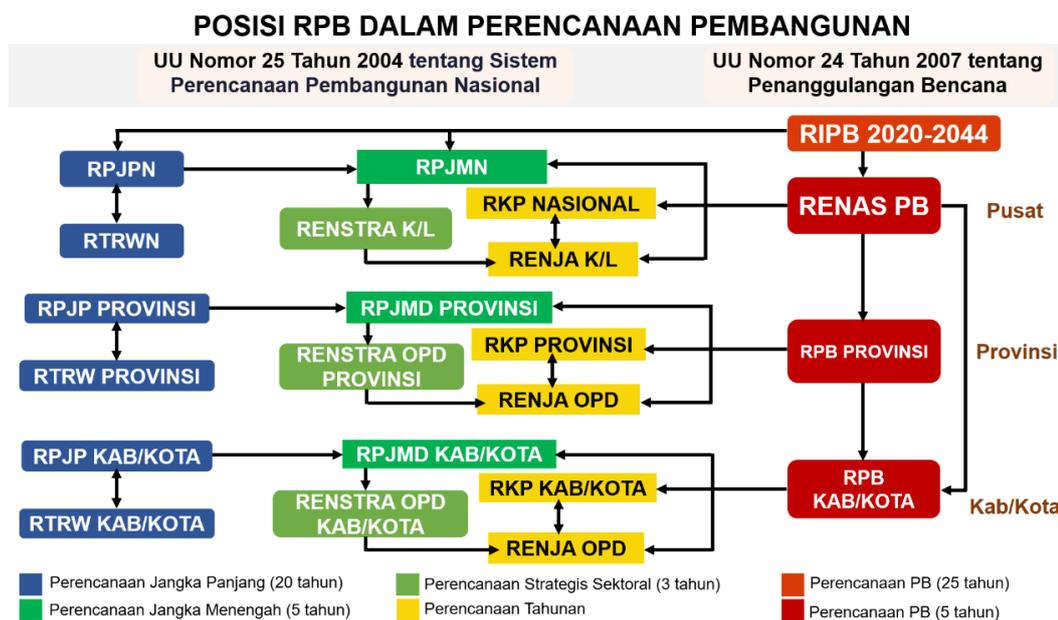
Iyha Dewi Rismayati

LAMPIRAN III

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMADUAN UNSUR-UNSUR PENANGGULANGAN BENCANA KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024

Contoh Telaah/Ringkasan Materi Pemaduan Penanggulangan Bencana Ke Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



Hubungan antara RPB dengan perencanaan lainnya mulai dari tingkat pusat seperti RIPB, Renas PB, dan RPJMN sampai tingkat daerah, dalam hal ini RTRW Daerah dan RPJMD. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti, RPJMD.

Gambar 2. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar diatas menunjukkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran RPJMD. RPB dalam proses penyusunannya juga merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB)

RPB bukan semata-mata perencanaan dalam sektor penanggulangan bencana, tetapi rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan di daerah dalam membangun masyarakat yang berketahanan bencana. RPB bertujuan untuk membuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor melalui RPJMD menjadi berketahanan bencana. Oleh karenanya RPB harus diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dengan demikian

program-program penanggulangan bencana dapat menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Selain itu, KRB dan RPB juga dapat menjadi bagian referensi dalam penyusunan RTRW Daerah yang sensitif/peka risiko bencana.

2. Gambaran Umum Kebencanaan Daerah

1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

a) Geografi

Secara geografis Kabupaten xx terletak di 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" Lintang Selatan. Terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. 3 (tiga) kecamatan berada di Kawasan Gunungapi dengan ketinggian 2.911 m di atas permukaan laut yang berpotensi terjadinya bencana letusan gunungapi diikuti banjir lahar dingin, serta kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan 4 di antaranya di kawasan pesisir yang berpotensi terjadinya tsunami.

b) Geologi

Ditinjau secara geologi, wilayah Kabupaten/Kota xxx termasuk daerah yang memiliki aktivitas gempa yang tinggi, karena adanya beberapa sesar aktif. Keberadaan sesar aktif ini selain memiliki potensi menimbulkan gempa juga dapat menimbulkan kegagalan struktur tanah sehingga tanah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung/menopang beban di atasnya (likuefaksi). Banyak pemukiman dan aktivitas masyarakat berada di daerah rawan gempa dan secara tanpa disadari rawan likuefaksi. Sesar yang berada di Kabupaten/kota xxx adalah: Sesar Opak (yang masih aktif sampai sekarang), Sesar Progo, Sesar Oyo dan Sesar Dengkeng.

c) Topografi

Ditinjau secara topografi, kawasan perbukitan menjadi bagian yang mendominasi Kabupaten xx, karena wilayahnya berada di sepanjang jajaran perbukitan. Terdapat 60% wilayah yang memiliki kelereng >40% yang tergolong sangat curam dan rawan bahaya longsor. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar kawasan di daerah ini rawan bahaya longsor.

d) Hidrologi

Ditinjau secara hidrologi, di wilayah Kabupaten/Kota xxx terdapat 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di Kabupaten/Kota xxx, sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Kabupaten/Kota lain yang hilirnya langsung bermuara di Samudra Indonesia. Keberadaan DAS di Kabupaten/Kota xxx rentan banjir khususnya ketika terjadi cuaca ekstrem. Tingginya sedimentasi di DAS-DAS ini mengakibatkan kapasitas dan daya tampung air berkurang drastis dan dapat memicu timbulnya kekeringan saat musim kemarau.

e) Klimatologi

Ditinjau secara klimatologi, Kabupaten/Kota xxx memiliki iklim tropika basah, dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 1600 – 4000 mm/tahun. Hal ini menyebabkan Kabupaten/Kota xxx memiliki kelembaban udara yang tinggi berkisar sekitar 80%. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim penghujan antara Januari-Mei dan musim kemarau antara Juni-Agustus. Tingginya curah hujan mempengaruhi tingkat daya tampung drainase pada permukaan tanah yang dapat mengalami penjuanan. Penjuanan ini berpotensi memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten/Kota xxx.

f) Demografi

Ditinjau secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten/Kota xxx tahun 2022 adalah 3.185.81 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana Kabupaten/Kota tahun 2022-2026, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 12 jenis ancaman di Kabupaten/Kota berada pada kelas sedang, kecuali pada kegagalan teknologi berada pada kelas Tinggi. Potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, kekeringan serta Covid -19.

2. Informasi Sejarah Kejadian dan Dampak Bencana

a. Sejarah Kejadian dan Dampak Bencana

Tabel 2.Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	70	9	10	-	13.511	173	1	2.365,09
2	Cuaca Ekstrem	264	28	166	-	1.214	1.154	381	1,00
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	14	-	2	-	-	90	1	-
4	Gempa Bumi	11	4.711	20.310	-	1.403.617	95.903	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	50	-	-	-	-	-	-	22.503,00
7	Letusan Gunungapi	13	279	186	-	171.927	2.346	-	-
8	Tanah Longsor	135	46	36	1	9.141	148	42	3,00
9	Tsunami	2	3	3	-	-	-	-	-
Total		560	5.076	20.713	1	1.599.410	99.814	425	24.872,09

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027

Tabel di atas menunjukkan, di wilayah xxx telah terjadi 560 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa dan kerusakan serta kerugian. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan trend meningkat adalah cuaca ekstrem sebanyak 264 kali. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah gempa bumi, yang menelan korban 4.711 jiwa meninggal dunia serta kerusakan bangunan dan lain-lain.

b. Penduduk yang Terpapar Ancaman Bencana

Jumlah penduduk terpapar ancaman bencana menyajikan data dan Informasi yang sangat penting untuk memberikan referensi bila ancaman bencana daerah tidak menjadi prioritas untuk ditangani.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Terpapar Ancaman Bencana

JENIS BAHAYA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)					Kelas
	Penduduk	KELOMPOK RENTAN				
		Rasio Jenis Kelamin	Umur Rentan	Penduduk Miskin		
1. Banjir	55.237	102	17.625	23.358	668	Tinggi
2. Banjir Bandang	17.324	100	5.457	8.114	376	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	172.658	103	54.419	74.727	1.653	Tinggi
4. Gempabumi	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-
6. Kekeringan	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi
7. Letusan Gunungapi Kerinci	4.328	104	1.361	1.866	-	Sedang
8. Likuefaksi	91.247	101	29.300	39.935	-	Tinggi
9. Tanah Longsor	18.661	100	5.865	8.925	794	Tinggi
Multi Bahaya	183.177	103	57.727	79.965	1.160	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel di atas potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang, kecuali pada kegagalan teknologi berada pada kelas Tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrem sebanyak 3.575.748 jiwa, gempa bumi 3.675.662 jiwa, kekeringan 3.675.662 jiwa, epidemi dan wabah penyakit 3.260.280 jiwa, kekeringan 3.675.662 jiwa serta Covid-19 3.675.662 jiwa. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga

c. Potensi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana

Penyajian data potensi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat bencana diperoleh dari penghitungan kerugian, kerusakan pasca kejadian setiap jenis bencana di xxx dan proyeksi keterpaparan. Kelas bahaya rendah pada kerusakan fisik baik rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis dapat diasumsikan tidak mengakibatkan kerusakan; bahaya sedang diasumsikan 50% rusak ringan; bahaya tinggi diasumsikan 50% rusak sedang. Sedangkan kelas bahaya pada kerusakan lingkungan dapat diasumsikan bahaya rendah tidak ada kerusakan; bahaya sedang 50% luasan lingkungan terdampak kerusakan; dan bahaya tinggi 100% luasan lingkungan terdampak kerusakan. Penyajian tabel potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat dilakukan seperti berikut;

Tabel 4. Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana

JENIS BAHAYA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)			Kelas	POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	Fisik	Ekonomi	Total Kerugian		Kerusakan Lingkungan	Kelas
1. Banjir	24.262,33	91,63	24.353,97	Tinggi	990,00	Tinggi
2. Banjir Bandang	39.688,14	90,14	39.778,28	Sedang	2.139,00	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	399.683,40	1.136,37	400.819,77	Tinggi	-	-
4. Gempabumi	798.143,90	1.532,43	799.676,33	Tinggi	-	-
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	454,44	454,44	Sedang	4.145,00	Tinggi
6. Kekeringan	-	1.022,18	1.022,18	Sedang	51.266,00	Tinggi
7. Letusan Gunungapi Kerinci	8.212,33	0,45	8.212,78	Sedang	2.681,00	Tinggi
8. Likuefaksi	64.128,98	178,74	64.307,72	Tinggi	3.540,00	Tinggi
9. Tanah Longsor	92.330,36	266,41	92.596,77	Tinggi	10.183,00	Tinggi
Multi Bahaya	1.009.471,13	2.076,34	1.011.547,47	Tinggi	93.531,00	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelas kerugian Sedang ada pada bahaya Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, sedangkan jenis bahaya lain memiliki kelas kerugian tinggi. Untuk Kelas kerusakan rendah untuk jenis bahaya Banjir, Likuefaksi dan Tanah Longsor. Kelas kerusakan tinggi pada Kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan letusan gunungapi Merapi.

d. Luas Wilayah Berpotensi Terdampak Bencana

Penentuan tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk setiap potensi bencana yang ada di daerah xxx. Kelas tinggi menunjukkan bahwa luas wilayah terdampak ancaman bencana memiliki tingkat risiko yang signifikan terhadap bencana yang dapat menyebabkan kerusakan besar, kerugian jiwa, atau dampak serius pada masyarakat dan lingkungan. Rincian tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5. Potensi Luas Wilayah Terdampak Bencana

JENIS BAHAYA	LUAS (Ha)			Total	KELAS
	Rendah	Sedang	Tinggi		
1. Banjir	8.038,89	8.130,60	4.541,40	20.710,89	Tinggi
2. Banjir Bandang	420,30	1.636,47	9.221,04	11.277,81	Tinggi
3. Cuaca Ekstrem	-	31.061,25	90.563,76	121.625,01	Tinggi
4. Gempa bumi	77.506,11	70.078,05	180.630,24	328.214,40	Tinggi
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	95.285,61	71.176,05	5.153,04	171.614,70	Sedang
6. Kekeringan	47.711,69	280.502,71	-	328.214,40	Sedang
7. Letusan Gunungapi Kerinci	9.043,56	2.022,66	1.701,27	12.767,49	Rendah
8. Likuefaksi	-	760,86	14.501,43	15.262,29	Tinggi
9. Tanah Longsor	170.313,66	19.155,87	19.578,24	209.047,77	Tinggi
Multi Bahaya	14.173,56	84.663,27	229.377,57	328.214,40	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 - 2029

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di xxx berada pada rentang kelas rendah, sedang dan tinggi. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu letusan gunung api kerinci sedangkan tingkat bahaya sedang yaitu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Bencana yang memiliki tingkat bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, cuaca ekstrem, likuefaksi dan tanah longsor. Kondisi ini wajib menjadi pertimbangan di xxx untuk memasukan program prioritas dan anggaran penanggulangan bencana khususnya untuk tingkat bahaya tinggi.

e. Informasi Tingkat Risiko Bencana di Daerah

Penentuan tingkat risiko bencana dapat dilakukan berdasarkan probabilitas dan kecenderungan atau besaran dampak dari setiap kejadian bencana. Penyajian kelas risiko bencana pada tabel berikut;

Tabel 6. Data Tingkat Risiko Bencana

JENIS BAHAYA	RISIKO			KELAS	TOTAL
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1. Banjir	12.731,13	7.557,12	422,64	20.710,89	Sedang
2. Banjir Bandang	3.460,14	7.602,57	215,10	11.277,81	Sedang
3. Cuaca Ekstrem	31.647,33	84.398,94	5.578,74	121.625,01	Sedang
4. Gempa bumi	217.012,77	77.876,34	33.325,29	328.214,40	Tinggi
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	104.511,69	67.103,01	-	171.614,70	Sedang
6. Kekeringan	104.197,11	224.017,29	-	328.214,40	Sedang
7. Letusan Gunungapi Kerinci	9.056,79	3.710,70	-	12.767,49	Sedang
8. Likuefaksi	4.874,76	8.061,48	2.326,05	15.262,29	Sedang
9. Tanah Longsor	179.456,76	27.322,29	2.268,72	209.047,77	Sedang
Multi Bahaya	72.716,49	217.852,07	37.645,84	328.214,40	Tinggi

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 - 2029

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Risiko di Provinsi/Kabupaten/Kota xxx berada pada rentang kelas sedang dan tinggi. Adapun bencana dengan tingkat risiko sedang yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan letusan gunung api kerinci, likufaksi dan tanah longsor. Bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi yaitu gempa bumi. Tingkat risiko juga mengacu pada peta risiko bencana untuk setiap potensi bencana yang ada di daerah xxx.

f. Identifikasi Risiko Bencana Terkait Aspek Tata Ruang

Identifikasi risiko bencana terkait aspek tata ruang dibawah ini:

Perencanaan pembangunan dan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan dan risiko bencana. Pemanfaatan daerah resapan dan tangkapan air dapat mengakibatkan ketika musim hujan air terhambat meresap ke dalam tanah dan membentuk genangan sehingga akhirnya terjadi banjir. Pembuangan sampah di sepanjang daerah aliran sungai atau cemaran dari limbah pabrik dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan, rusaknya ekosistem sungai, menurunkan kualitas air tanah dan memicu risiko banjir.

Penambangan ilegal juga dapat menimbulkan risiko abrasi pantai, tanah

longsor, dan banjir, baik di lokasi penambangan maupun di daerah sekitarnya dan mengganggu kondisi ekosistem. Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi peruntukan lain seperti pemukiman atau bangunan infrastruktur berpotensi mengurangi peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi cadangan air dalam tanah juga dapat berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan kerentanan ekologis.

g. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam bidang PB

Gambaran Umum Kondisi Wilayah dari rancangan RPJMD pada bagian Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya. IRBI dan IKD pada tabel berikut:

Tabel 7. Data Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja PB	Capain Tahunan					Kelas
			(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	
1	DIY	IRBI	126,34	121,93	117,52	113,11	-	Sedang
		IKD	0,79	0,63	0,65	0,70	-	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027

h. Penyajian Capaian SPM Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM masuk dalam aspek pelayanan umum dan terdiri dari 3 variabel pokok yaitu : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Penyajian ini akan mencerminkan laju layanan di daerah dari tahun ke tahun.

Penyajian data bisa seperti pada tabel berikut :

Tabel 8. Penyajian capaian SPM Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
	KAB. ACEH TAMIANG				4,873,110,900	4,832,803,314	99.17 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,830,714,200	1,818,382,147	99.33 %
	4	Pelayanan	Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456		0	0.00 %	
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0.00 %	
	5	Pelayanan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447		1,830,714,200	1,818,382,147	99.33 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	102,000,000	101,712,200	99.72 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0%	
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,726,714,200	1,714,689,947	99.30 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan pengalihan tenaga bencana untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Unit	0	0%	
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Dokumen	0	0%	
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0%	
		7	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	2,000,000	1,980,000	99.00 %
		8	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0%	
		9	Glati kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0%	
		10	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0%	
		11	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Dokumen	0	0%	
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Dokumen	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR				1,830,714,200	1,818,382,147	99.33 %
	6	Pelayanan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445		0	0.00 %	
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0%	
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0%	
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0%	
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0%	
		5	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0%	
		6	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR				571,105,000	560,505,000	98.14 %
	JUMLAH PROGRAM				660,205,000	649,590,000	98.39 %
	KEGIATAN LAINNYA						
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

Sumber: Penyajian capaian SPM Kabupaten Aceh Tamiang 2023

Penyajian capaian SPM sub urusan kebencanaan di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan tahun 2023 indikator layanan informasi rawan bencana mencapai, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 98.14% sedangkan realisasi program mencapai 98.39%

3. Permasalahan dan Isu Strategis PB

1. Masalah pokok PB

Tabel 9. Daftar Identifikasi Masalah Pokok PB

Keterpaparan dari Sumber Bahaya (KRB)	Kajian Kapasitas Daerah (IKD)	Masalah Pokok Pembangunan
<p>Permasalahan spesifik yang teridentifikasi berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana di xx adalah sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemeliharaan daerah tangkapan air yang belum optimal 2. Masih adanya pemukiman masyarakat di daerah rawan bencana 3. Kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah 	<p>Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah di xxx, terdapat beberapa prioritas yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah 2. Belum optimalnya penguatan kapasitas daerah rawan bencana 3. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 	<p>Berdasarkan RPJMD xxx , terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan saluran air dan daerah tangkapan air yang belum optimal 2. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana 3. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 - 2029

2. Isu Strategis Penanggulangan Bencana Daerah

Daftar identifikasi isu strategis kebencanaan di Kabupaten xxx periode 202X-202X adalah sebagai berikut

Isu Strategis 1; Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal. Peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana sangat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya pengetahuan terhadap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan deteksi dini bencana. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana baik dalam hal kesiapsiagaan maupun penanganan darurat bencana daerah ke depan mendesak untuk dikelola lebih optimal.

Isu Strategis 2; Belum adanya Sistem Pemulihan Pasca Bencana secara Komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan. Isu ini sangat penting karena di xx sistem pemulihan pasca bencana berjalan secara sektoral dan belum disusun berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Disamping itu mekanisme pemulihan pasca bencana masih terbatas dan belum secara komprehensif melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

Isu Strategis 3; Kurangnya Pengelolaan DAS, Hutan dan Lingkungan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Salah satu faktor penyebab

terjadinya bencana banjir dan banjir bandang adalah kurang optimalnya pengelolaan DAS dan *catchment area*. Penyempitan pada DAS merupakan salah satu lokus yang perlu diintervensi dalam upaya mitigasi bencana

Isu Strategis 4; Belum Optimalnya Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Masih banyaknya pemukiman di kawasan berisiko bencana, terutama di perbukitan rawan longsor menyebabkan banyak masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Disamping itu, banyak bangunan permukiman belum menerapkan standar konstruksi ramah gempa bumi khususnya di jalur patahan.

Sumber: Diolah dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

4. Tujuan dan Sasaran PB Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran PB pada tabel berikut;

Tabel 10. Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Kurangnya Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana secara komprehensif dan menyeluruh	Mewujudkan penyelenggaraan PB yang inklusi dan kolaboratif	Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana	1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	1. Terwujudnya upaya kesiapsiagaan bencana daerah
			2. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	2. Terwujudnya upaya penanganan darurat bencana daerah
			3. Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus	3. Terwujudnya kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus
			4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	4. Terwujudnya dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah
2. Belum optimalnya Sistem pemulihan pasca bencana secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan				
3. Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko bencana masih kurang			5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Terkelolanya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air
			6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan	6. Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan

			bencana	bencana
4. Belum optimalnya tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana			7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	7. Terlaksananya pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
			8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	8. Terkelolanya fungsi drainase pada kawasan permukiman

Sumber: Diolah dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

5. Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB Daerah

1. Strategi, Arah Kebijakan

Rumusan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan seperti pada tabel berikut;

Tabel 11. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	1. Penguatan kapasitas SDM, kelembagaan dan kesiapsiagaan bencana daerah	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar manajemen bencana
2. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	2. Penguatan sistem penanganan darurat bencana daerah	2. Penyusunan regulasi-regulasi dasar penanggulangan bencana
3. Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus	3. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana	3. Menambah jumlah kapasitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
	4. Peningkatan kapasitas sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana	4. Menjadikan program satuan pendidikan aman bencana sebagai program wajib di setiap sekolah/satuan pendidikan.
	5. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan nagari	5. Pelatihan bagi forum pengurangan risiko bencana desa/nagari dan relawan bencana di komunitas

Sumber: Diolah dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

2. Program PB Daerah

Rumusan Prioritas Program Kebencanaan Daerah seperti pada tabel berikut;

Tabel 12. Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM
1. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	1. Terwujudnya upaya kesiapsiagaan bencana daerah	1. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	1. Adanya peraturan yang komprehensif dan terperinci terkait dengan kesiapsiagaan
		3. Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan daerah	3. Tersedianya informasi tentang risiko bencana kepada penduduk pemukiman, termasuk peta bahaya, peringatan dini, dan prosedur evakuasi dalam bahasa dan format yang mudah dimengerti.
		4. Penguatan kelembagaan PB non Pemerintah di Daerah	4. Terbentuknya Forum PRB yang didukung dengan regulasi dan sarana prasarana pendukung
		5. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Daerah	5. Meningkatnya jumlah personil PB yang memiliki sertifikasi dan kompetensi terkait PB
		6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah	6. Terbangunnya sistem peringatan dini untuk bencana- bencana priritas daerah
		7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	7. Tersusunnya kajian peralatan dan logistik kebencanaan daerah
2. Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	2. Terwujudnya upaya penanganan darurat bencana daerah	8. Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah	8. Tersusunnya dokumen penanganan darurat bencana daerah
3. Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus	3. Terwujudnya kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus	9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana	9. Meningkatnya jumlah Rumah Sakit dan sekolah/madrasah aman bencana
		10. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat	10. Meningkatnya jumlah desa siaga/tangguh bencana di daerah
4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	4. Terwujudnya dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah	11. Penguatan sistem pemulihan pasca bencana daerah yang melibatkan sektor-sektor kunci	11. Tersusunnya kajian pemulihan paska bencana di daerah yang melibatkan sektor-sektor kunci
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Terkelolanya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	12. Pengelolaan DAS dan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana	12. Menurunnya frekwensi kejadian banjir dan longsor di daerah
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan	6. Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan	13. Pengelolaan tutupan lereng di daerah berisiko bencana	13. Adanya kebijakan daerah tentang perlindungan kawasan tangkapan dan resapan air

lingkungan di kawasan rawan bencana	pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana	14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	14. Menurunnya kasus pemanfaatan penggunaan lahan dan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
		15. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan daerah	15. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah (TPS dan TPA) sesuai dengan jenis sampahnya
7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	7. Terlaksananya pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	16. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di daerah rawan bencana	16. Menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan rawan bencana
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	8. Terkelolanya fungsi drainase pada kawasan permukiman	17. Optimalisasi fungsi drainase	17. Menurunnya frekwensi kejadian banjir di Kawasan pemukiman

Sumber: Diolah dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2029

6. Indikator Kinerja PB Daerah

Tabel 13. Proyeksi Pencapaian Indikator Kinerja Daerah untuk PB

No	Indikator Kinerja PB	Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2023	Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB					Kondisi Akhir Periode (2029)	Sumber Data
			Tahun ke-1 (2024)	Tahun ke-2 (2025)	Tahun ke-3 (2026)	Tahun ke-4 (2027)	Tahun ke-5 (2028)		
1	IRBI	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88			BNPB
2	IKD	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85			BPBD

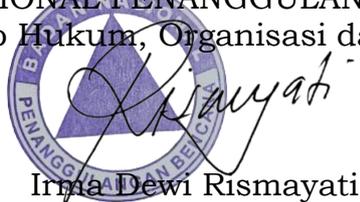
Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022- 2027

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Irma Dewi Rismayati

LAMPIRAN IV

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMADUAN UNSUR-UNSUR PENANGGULANGAN BENCANA KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024

Ketentuan Pengambilan Data Dan Informasi Risiko Bencana Pada Kajian Risiko Bencana Nasional (Skala 1:250.000)

1. Pengambilan Data Peta

Data/peta diambil langsung dari Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi yang disajikan secara nasional (Skala 1:250.000). Data peta ditampilkan dalam *layout* level provinsi, cukup untuk menunjukkan posisi daerah berpotensi bencana walaupun masih dengan skala provinsi. Untuk mengambil data tersebut, dapat mengikuti langkah berikut.

1. Buka tautan <https://bit.ly/PetaKRBNasional2022-2026>
2. Tautan tersebut akan mengarah ke dalam folder. Masuk ke folder yang sesuai dengan Provinsi di masing-masing Kabupaten/Kota.
3. Pilih dan Unduh jenis bencana dan bahaya/kerentanan/kapasitas/risiko sesuai kebutuhan.

2. Pengambilan Data Atribut (Tabulasi Data)

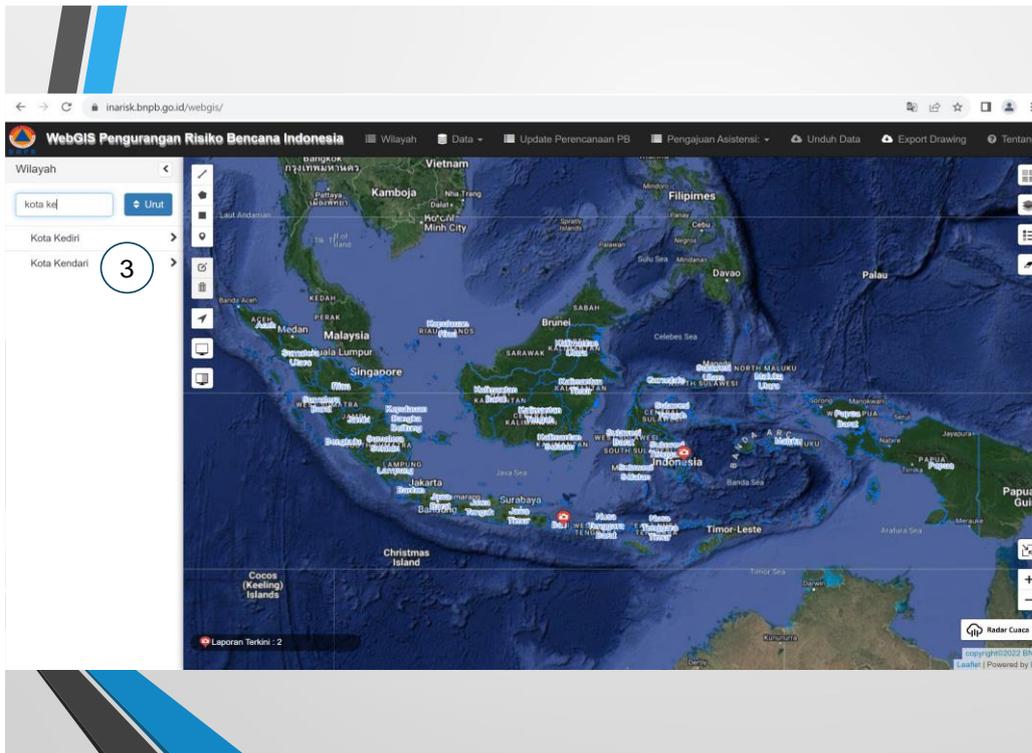
Data atribut atau juga dikenal dengan data tabular dari informasi spasial merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari informasi kebencanaan. Data atribut diambil dari KRB Provinsi yang disajikan secara nasional. Data atribut memuat luasan bahaya, jumlah penduduk terpapar, jumlah kerugian baik fisik maupun ekonomi, luasan lingkungan yang rusak, tingkat kapasitas, maupun tingkat risiko bencana. Untuk mengambil data atribut, dapat mengikuti langkah sebagai berikut.

Langkah 1; Buka tautan <https://inarisk.bnpb.go.id/webgis>

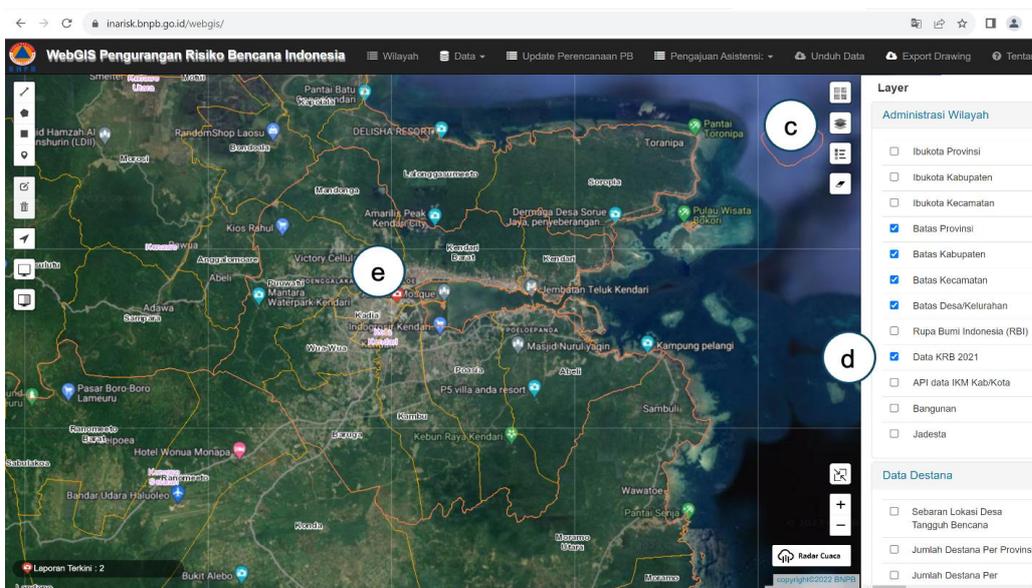


Langkah 2; Setelah tautan terbuka lakukan langkah-langkah berikut:

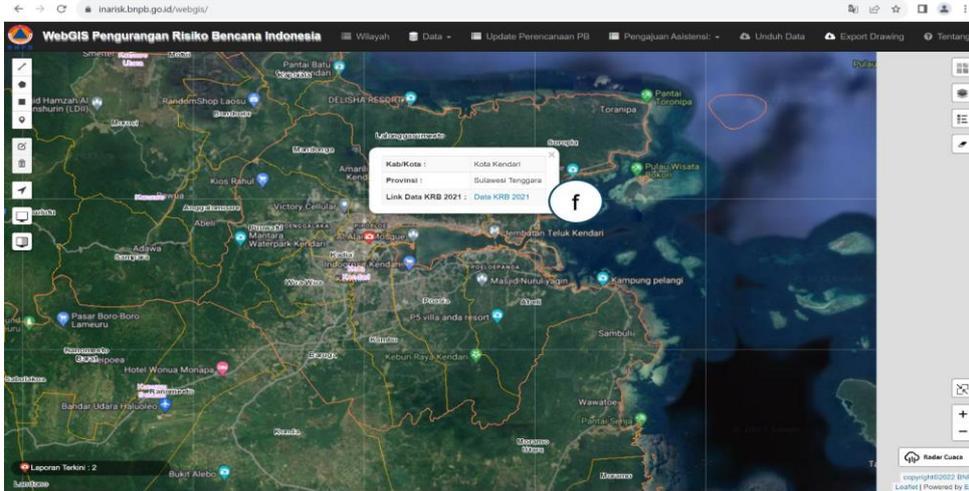
- 1) Tulis nama Kabupaten/Kota pada menu wilayah
- 2) Click nama wilayah Kabupaten/Kota



- 3) Click icon layer
- 4) Centang nama layer **Data KRB 2021**
- 5) Click wilayah di peta



- 6) Click Tulisan biru "**Data KRB 2021**" untuk memunculkan data tabulasi



7) *Click* tulisan Excel untuk **download data atribut**

ID Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Bencana	Total Bahaya Rendah	Total Bahaya Sedang	Total Bahaya Tinggi	Total Bahaya HA	Jiwa Terpapar Rendah	Jiwa Terpapar Sedang	Jiwa Terpapar Tinggi	Total Jiwa Terpapar	Rasio Jenis Kelamin	Kelompok Umuran	Penduduk Miskin
7471010	Mandonga	Gempabumi	2.903,05	0	0	2.903,05	37.394	0	0	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Tsunami	19,85	6,62	9,92	36,38	847	81	0	928	99,99	87	55
7471010	Mandonga	Banjir	11,03	207,28	233,74	452,05	656	10.495	4.080	15.231	99,99	1.422	903
7471010	Mandonga	Banjir Bandang	0	4,41	22,05	26,46	0	82	724	806	99,99	75	48
7471010	Mandonga	Tanah Longsor	186,46	919,54	63,95	1.181,95	539	1.244	0	1.783	99,99	167	106
7471010	Mandonga	Kebakaran Hutan & Lahan	1,1	968,05	891,98	1.861,13	0	0	0	0	0	0	0
7471010	Mandonga	Kekeringan	0	0	2.903,05	2.903,05	0	0	37.394	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Cuaca Ekstrem	2.170,95	307,62	424,49	2.903,05	4.232	2.174	30.988	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Galombang Ekstrem dan Abrasi	320,52	0	293,34	613,86	18.056	0	731	18.787	0	596	676
7471010	Mandonga	Likuefaksi	0	202,87	31,97	234,85	0	12.474	242	12.716	99,99	1.187	754

Langkah 3; Tampilan *File excel* yang telah diunduh adalah berikut.

ID Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Bencana	Total Bahaya Rendah	Total Bahaya Sedang	Total Bahaya Tinggi	Total Bahaya HA	Jiwa Terpapar Rendah	Jiwa Terpapar Sedang	Jiwa Terpapar Tinggi	Total Jiwa Terpapar	Rasio Jenis Kelamin	Kelompok Umuran	Penduduk Miskin
7471010	Mandonga	Gempabumi	2.903,05	0	0	2.903,05	37.394	0	0	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Tsunami	19,85	6,62	9,92	36,38	847	81	0	928	99,99	87	55
7471010	Mandonga	Banjir	11,03	207,28	233,74	452,05	656	10.495	4.080	15.231	99,99	1.422	903
7471010	Mandonga	Banjir Bandang	0	4,41	22,05	26,46	0	82	724	806	99,99	75	48
7471010	Mandonga	Tanah Longsor	186,46	919,54	63,95	1.181,95	539	1.244	0	1.783	99,99	167	106
7471010	Mandonga	Kebakaran Hutan & Lahan	1,1	968,05	891,98	1.861,13	0	0	0	0	0	0	0
7471010	Mandonga	Kekeringan	0	0	2.903,05	2.903,05	0	0	37.394	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Cuaca Ekstrem	2.170,95	307,62	424,49	2.903,05	4.232	2.174	30.988	37.394	99,99	3.492	2.217
7471010	Mandonga	Galombang Ekstrem dan Abrasi	320,52	0	293,34	613,86	18.056	0	731	18.787	0	596	676
7471010	Mandonga	Likuefaksi	0	202,87	31,97	234,85	0	12.474	242	12.716	99,99	1.187	754

Langkah 4; *File* tersebut perlu disesuaikan formatnya dan dibagi menjadi empat (4) jenis informasi seperti pada tampilan di bawah ini:

No	Jenis Bahaya	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Jumlah Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	932.972	114.656	140.806	4.398	SEDANG
2	Banjir Bandang	51.785	6.579	9.978	209	SEDANG
3	Covid-19	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
4	Cuaca Ekstrem	3.575.748	447.516	533.851	18.047	SEDANG
5	Epidemi Wabah Penyakit	3.260.280	418.887	518.492	17.342	SEDANG
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	5.286	772	1.011	41	SEDANG
7	Gempa bumi	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
9	Kegagalan Teknologi	130	15	34	1	TINGGI
10	Kekeringan	3.675.662	462.691	552.796	18.991	SEDANG
11	Letusan Gunungapi Merapi	63.428	7.854	9.597	310	SEDANG
12	Likuefaksi	2.082.461	243.933	282.528	9.080	SEDANG
13	Tanah Longsor	390.018	58.245	75.190	2.791	SEDANG
14	Tsunami	26.438	4.384	5.597	261	SEDANG

No	Jenis Bahaya	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas Kerusakan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
1	Banjir	4.362.890	2.567.905	6.930.795	Tinggi	4	Rendah
2	Banjir Bandang	316.542	130.383	446.924	Tinggi	-	-
3	Covid-19	-	-	-	-	-	-
4	Cuaca Ekstrem	26.993.157	5.394.003	32.387.160	Tinggi	-	-
5	Epidemi Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
6	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	6.718	3.156	9.874	Sedang	-	-
7	Gempa bumi	23.586.595	13.846.757	37.433.352	Tinggi	-	-
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	6.733.084	6.733.084	Rendah	336	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	-	78	78	Rendah	-	-
10	Kekeringan	-	28.017.959	28.017.959	Rendah	1.249	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Merapi	141.670	41.538	183.208	Tinggi	175	Tinggi
12	Likuefaksi	5.402.077	4.642.697	10.044.774	Tinggi	4	Rendah
13	Tanah Longsor	1.802.632	10.249.628	12.052.260	Tinggi	33	Rendah
14	Tsunami	217.970	63.422	281.392	Tinggi	0	Rendah

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	70	9	10	-	13.511	173	1	2.365,09
2	Cuaca Ekstrim	264	28	166	-	1.214	1.154	381	1,00
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	14	-	2	-	-	90	1	-
4	Gempa Bumi	11	4.711	20.310	-	1.403.617	95.903	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	50	-	-	-	-	-	-	22.503,00
7	Letusan Gunungapi	13	279	186	-	171.927	2.346	-	-
8	Tanah Longsor	135	46	36	1	9.141	148	42	3,00
9	Tsunami	2	3	3	-	-	-	-	-
Total		560	5.076	20.713	1	1.599.410	99.814	425	24.872,09

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama,



Iyana Dewi Rismayati